

# **Integrasi Sosial Muslim-Tionghoa Studi atas Partisipasi PITI DIY dalam Gerakan Pembauran**

*Oleh: Fahmi Rafika Perdana*

*Dosen Universitas Widiya Mataram Yogyakarta*

## **Abstract**

Agenda ethnic assimilation in Indonesia often take a lot of attention, given the realities of multi-ethnic population. Assimilation pri and nonpri or between ethnic Chinese and the Natives have been made parties to create lasting social integration. One of them through the Islamization of the ethnic Chinese. Associated with it, PITI who organized ethnic-Chinese Muslims, have a lot of work in the middle of complex challenges. Various cases of ethnic violence in various cities, the May case `98, discrimination administration services, as well as the latent threat related to the socio-economic gap has proved the magnitude of the challenge for assimilation movement. Apparently, humans live in a world narrowed ethnicity and grim. This article photographing PITI organizational dynamics and participation in the assimilation movement, accompanied by an analysis of the drivers and internal and external constraints confronting. Laborious the ethnic assimilation agenda in Indonesia, the handling is one of the main pillars in strengthening national unity

**Keyword:** *Integrasi sosial, Muslim Tionghoa, Gerakan Pembauran*

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia mendapat predikat sebagai bangsa yang multikultural. Masyarakatnya yang majemuk memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, dan ras. Masyarakat majemuk didefinisikan oleh Clifford Geertz sebagai suatu masyarakat yang terbagi dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri di mana masing-masing subsistem terikat dalam ikatan yang bersifat primordial (Nasikun, 2001: 33). Di Indonesia selain penduduk asli atau pribumi terdapat pula aneka ragam penduduk keturunan asing atau pendatang. Masing-masing terdiri dari berbagai suku dan ras. Kaum pendatang di Indonesia berasal dari Timur Tengah atau keturunan Arab, Eropa, dan keturunan Tionghoa. Kaum pendatang ini mendatangi Indonesia dengan berbagai macam tujuan. Pada etnis Tionghoa, era kedatangan pertamanya yang terjadi pada sekitar perjalanan Muhibah Laksamana Haji Muhammad Cheng Hoo (Sam Po Kong atau Sam Po Tay Jin) keliling dunia termasuk ke berbagai negeri atau kerajaan di Asia Tenggara itu, adalah para perantau yang keliling keluar dari negeri Tiongkok dengan tujuan berdagang saja<sup>1</sup>. Dari keseluruhan pendatang suku Tionghoa relatif mempunyai jumlah lebih banyak.

Sejarah mencatat bahwa sejak zaman penjajahan tersebut etnis Tionghoa diperlakukan “lebih” dibandingkan pribumi Indonesia. Secara struktural dari segi ekonomi, pribumi berada pada posisi paling bawah, sedangkan kedua golongan lainnya jauh di atasnya. Dari kebijakan politik penjajah yang melakukan politik memecah belah penduduk di negara jajahannya tersebut (politik *divide et impera*), menimbulkan kecemburuan sosial golongan pribumi terhadap golongan etnis Tionghoa (Zainal Asikin, 2004). Pada masa sekarang meskipun secara kuantitatif jumlah WNI keturunan Tionghoa hanya 5% dari keseluruhan penduduk Indonesia, tetapi dari segi ekonomi posisi dan peranannya sangat dominan. Dengan mudah dapat diamati di mana ada pusat-pusat kegiatan ekonomi di situ

---

<sup>1</sup> Redaktur, *Tionghoa di Indonesia*, Artikel dalam Buku Peranan PITI dalam Integrasi Bangsa: Silaturahmi PITI Jatim, Tim Penerbit Buku Kenangan Korwil PITI Jatim, Surabaya, 2003.

dapat dipastikan keberadaan WNI keturunan Tionghoa sangat menonjol (Pranowo, 1994: 4).

Penguasaan etnis ini pada bidang ekonomi membuat semacam jurang pemisah dengan penduduk asli, mengingat mereka adalah kaum pendatang tetapi dapat menguasai bidang yang sangat vital tersebut sehingga konflik di antara mereka rawan terjadi. Mereka sulit berbaur satu sama lain juga dikarenakan adanya rasa kurang percaya terhadap mereka yang berlainan etnis. Dengan pola hubungan yang seperti ini tidak mengherankan jika kemudian terbentuk semacam tembok sosial yang menghalangi proses pembauran keduanya. Lebih-lebih saat ini tembok sosial tampak secara fisik dalam bentuk tembok-tembok atau benteng-benteng tinggi yang memisahkan pemukiman penduduk asli dan etnis Tionghoa (Pranowo, 1994: 5). Akibatnya sampai sekarang integrasi antara etnis Tionghoa dan penduduk asli Indonesia belum sepenuhnya terwujud.

Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan menggunakan cara yang diungkapkan di atas maka perlu suatu wadah atau badan. Wadah yang dimaksud yaitu suatu lembaga yang dapat menjadi jembatan antara warga Tionghoa dengan penduduk asli. Dengan adanya jembatan penghubung tersebut diharapkan pembauran antara kedua belah pihak dapat terjalin dan pada akhirnya mewujudkan integrasi sosial.

PITI (Pembina Iman Tauhid Islam) adalah sebuah organisasi dakwah yang bercirikan etnis Tionghoa. Didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1961, antara lain oleh almarhum H. Abdul Karim Oie Tjeng Hien, almarhum H. Abdusomad Yap A Siong dan almarhum Kho Goan Tjin dengan tujuan untuk mempersatukan muslim Tionghoa di Indonesia dalam satu wadah yang dapat lebih berperan dalam proses persatuan bangsa Indonesia. Organisasi ini menggunakan peranan dan potensi agama sebagai perekat integrasi sosial terutama yang berkaitan dengan pembauran etnis Tionghoa. PITI diharapkan dapat menjadi "jembatan" antara suku Tionghoa dengan suku-suku lain di Indonesia (wawancara dengan Tanudjaja, 3 Desember 2005, di Surabaya).

PITI adalah organisasi bertaraf nasional dengan sebelas Koordinator wilayah (Korwil) se-Indonesia, di antaranya adalah Korwil PITI Yogyakarta yang berdiri tanggal 20 September 1970. Kondisi PITI seperti yang telah ditulis di atas merupakan gambaran umum yang juga terjadi pada Korwil PITI karena gambaran tersebut merupakan rangkuman dari kondisi PITI secara keseluruhan. Seluruh Korwil PITI diberi kebebasan menentukan kegiatan dan strategi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dengan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar / AD dan Anggaran Rumah Tangga / ART yang telah menjadi pedoman seluruh anggota PITI dari pusat hingga daerah. Kegiatan-kegiatan inilah yang memberi gambaran seberapa jauh organisasi ini berperan dalam integrasi sosial.

PITI juga merupakan organisasi non politis yang berperan sebagai tempat sebagian besar orang-orang Tionghoa Muslim mengamalkan hukum Islam serta mengajarkan tidak ada kelas yang membedakan kecuali takwanya. Oleh sebab itu, diharapkan keberadaan PITI di tengah lapisan masyarakat dapat menjadi “jembatan emas” bagi terciptanya kerukunan umat beragama maupun kerukunan antar suku. Dari rangkaian penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu pertama, strategi organisasi PITI Korwil DIY dalam pemberdayaan individunya untuk mencapai tujuan-tujuannya khususnya dalam hal memberikan dukungan dan mewujudkan integrasi sosial. Kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi kendala dan pendorong terwujudnya integrasi sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk; *pertama*, mengetahui sejauh mana sebuah organisasi sosial formal yaitu PITI Korwil DIY memberikan peranannya dalam membangun proses integrasi sosial. *Kedua*, interelasi antara dinamika kepemimpinan dan eksistensi organisasi, dinamika perkembangan dan tantangan masa depan organisasi dalam rangka integrasi sosial.

## B. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan PITI

Awal pembentukan Pembina Iman Tauhid Islam dahulu bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada saat masih butuknya hubungan antara etnis Tionghoa dan pribumi. Buruknya hubungan tersebut diperkirakan karena dampak dari pembagian strata tiga golongan yang dilakukan oleh Belanda sat menjajah Indonesia.

Pembagian strata tersebut menjauhkan orang-orang Tionghoa dari pribumi baik secara sosial budaya maupun ekonomi, karena dengan perlakuan istimewa kepada orang-orang Tionghoa dari Belanda mengakibatkan adanya “jurang sosial” dengan pribumi. Orang Tionghoa dipandang kehidupannya lebih baik dibandingkan pribumi. Ditambah pula dengan stigma-stigma buruk yang sebenarnya berasal atau dibuat oleh penjajah agar dua golongan tersebut tidak bersatu. Mereka takut jika dua golongan tersebut bersatu akan membahayakan posisi mereka sebagai penjajah (wawancara dengan Tanudjaja, 3 Desember 2005, di Surabaya).

Hal yang perlu menjadi salah satu catatan dari pendirian PITI ini adalah pendirian PITI selain untuk merealisasikan perkembangan Ukhuwah Islamiyah di kalangan muslim Tionghoa juga sebagai tanggapan realistis atas saran Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Alm. KH. Ibrahim kepada Alm. H. Abdul Karim Oey bahwa untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada etnis Tionghoa harus dilakukan oleh etnis Tionghoa yang beragama Islam. Hal ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari kalangan di luar Tionghoa Muslim terhadap perkembangan Islam Tionghoa di Indonesia sehingga dapat nilai hubungan antara dua kalangan tersebut cukup baik.

Jadi pada awal pembentukan PITI sebenarnya unsur pembauran yang identik pula dengan integrasi sosial mempunyai peran penting sebagai latar belakang pendirian organisasi ini. Pendiriannya merupakan tanggapan realistis dari saran Ketua PP Muhammadiyah saat itu. Hal tersebut menunjukkan kepedulian dari pihak Pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa. Pendirian PITI tersebut tidak hanya sekedar sebagai wadah berkumpulnya etnis Tionghoa muslim

tapi lebih dari itu mempunyai tujuan mulia yaitu dakwah dalam rangka asimilasi atau pembauran.

### **C. Sejarah Berdirinya PITI Korwil DIY**

Berdirinya PITI mendapat sambutan spontan dari masyarakat luas sehingga PITI tumbuh dan berkembang dari kota ke kota termasuk Yogyakarta. Meski dalam perjalanannya PITI mengalami pasang surut, PITI Yogyakarta atau secara resmi disebut PITI Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (PITI Korwil DIY) tetap ada sebagai salah satu komponen PITI nasional.

Menurut catatan, PITI DIY berdiri pada tanggal 20 September 1970 atas inisiatif para pendiri dan pengurus PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) di antaranya Prof. KH. Abd. Kahar Muzakir, GBPH. H. Prabu Ningrat, KH. M. Djoenaid, KH. R. Therus, KH. Muhadi Munawir, KH. Ali Maksum, dan Prof. Mukti Ali. Mereka mengajak Iksan Budisantoso dan Ahmad Sutanto yang keturunan Tionghoa Muslim untuk mendirikan PITI Yogyakarta sebagai lembaga dakwah untuk warga Tionghoa. Pendirian PITI Yogyakarta ini dikonfirmasi pada PITI Pusat dan ditanggapi dengan langsung hadirnya pejabat PITI Pusat H. Karim Oey untuk melantik pejabat atau pengurus PITI DIY yang pertama. Hadir pula dalam pelantikan tersebut Menteri Sosial waktu itu HMS. Mitardji, SH dan Rohis Angkatan Darat Brig. Jend. Muklas Prowi. Dengan hadirnya pejabat Pemerintah saat pelantikan berlangsung menunjukkan hubungan PITI dengan Pemerintah cukup baik (wawancara dengan Ahmad Sutanto, 24 Januari 2006, di Yogyakarta).

Hal yang perlu digarisbawahi dalam sejarah berdirinya PITI DIY ini adalah bahwa inisiator pembentukan organisasi ini bukanlah warga keturunan Tionghoa melainkan para tokoh-tokoh PDHI yang dapat disebut pula sebagai tokoh agama Islam Yogyakarta, di mana tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan keturunan etnis Tionghoa.

#### **D. Proses Integrasi Sosial Warga PITI DIY sebagai Kegiatan Organisasi**

Dalam proses eksistensinya organisasi PITI DIY mengalami pasang surut dalam berbagai segi, termasuk dalam segi pembauran. Pembauran merupakan salah satu tujuan organisasi sekaligus harapan banyak pihak bahwa PITI dapat menjadi jembatan, lem, perekat, dan benang persatuan dan kesatuan bangsa bagi umat Islam dengan etnis Tionghoa dan antar suku-suku bangsa Indonesia. Dari beberapa kejadian yang berkaitan dengan pembauran dalam PITI DIY dapat dilihat seberapa besar perannya.

Sejak awal berdirinya, seperti halnya PITI pusat terdapat peran serta dari golongan luar Tionghoa sendiri yaitu Pengurus PP Muhammadiyah untuk PITI Pusat dan Pengurus PDHI untuk PITI DIY, di mana kesemuanya merupakan warga non Tionghoa atau penduduk asli. Bahkan untuk PITI DIY, PDHI bersedia memberikan dukungan baik dalam bentuk bimbingan, pemikiran maupun sarana prasarana dalam kegiatan organisasi. Berawal dari hal tersebut kemudian para pengurus PITI sendiri tidak semuanya berasal dari golongan Tionghoa. Hal ini adalah ketika diadakan pengajian atau ceramah-ceramah agama dengan pembicara orang Tionghoa, sambutan dari masyarakat antusias, yang datang melimpah. Hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk cikal bakal interaksi yang berkaitan dengan pembauran warga PITI dengan masyarakat khususnya yang beragama Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia.

PITI DIY pernah berperan meredamkan peristiwa yang mengandung risiko besar, yaitu ancaman kerusuhan. Dua puluh tahun lalu ketika Toko Gardena terbakar dengan kobaran api yang menakutkan hingga membuat para tetangga di sekelilingnya khawatir kalau-kalau rumah dan tokonya turut terbakar, ada insiden yang dapat memicu amuk massa. Pemilik Toko Siswa Muda yang menjual alat tulis, yang terletak di sebelah Toko Gardena, khawatir tokonya ikut terbakar sehingga ia mengevakuasi barang dagangannya dengan dibantu beberapa orang. Namun ada oknum yang

memanfaatkan keadaan sehingga dipukul oleh pemilik toko. Oknum tersebut mengadu kepada teman-teman dan warga sekitar dengan kepanikan dan amarah, sehingga warga sekitarnya terpengaruh dan merasa tidak terima atas pemukulan tersebut. Berkumpullah kerumunan massa yang marah dan ingin menuntut balas dan tersebarlah isu-isu yang menjurus pada tindakan anarkis yang berpotensi menyebar luas ke toko-toko lainnya serta berbagai pihak yang tidak bersalah.

Dalam kaitan dengan berbagai permasalahan sosial ini, warga PITI DIY menyadari peran pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam proses integrasi sosial Muslim Tionghoa. Karena diakui atau tidak, suara dari seorang etnis Tionghoa Muslim itu ternyata lebih didengarkan oleh warga negara Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Suara tersebut dapat dimengerti dengan mudah dan cepat karena ada persamaan identitas keislaman.

### **E. Hubungan Internal-Eksternal dan Pengaruh Eksternal yang diharapkan Organisasi**

Sebagai sebuah organisasi PITI DIY berhubungan dengan berbagai komponen masyarakat baik dalam internal organisasi PITI maupun dengan pihak dari luar atau eksternal organisasi. Oleh karena itu akan dibahas pula hubungan PITI DIY dengan PITI Pusat, dengan PITI Korwil lain, dengan organisasi masyarakat, golongan warga masyarakat lainnya dan dengan Pemerintah.

PITI DIY dinilai oleh beberapa pihak lebih baik dari pada PITI Pusat maupun PITI Korwil lain, kecuali PITI Korwil Jawa Timur. Terdapat indikasi mengapa untuk saat ini Korwil Jawa Timur adalah yang terbaik dalam PITI, karena Korwil ini ditunjang pendanaan yang besar dari para warganya dan pengusaha-pengusaha yang sangat loyal terhadap keberadaan organisasi.

Hubungan PITI DIY dengan organisasi masyarakat yang lain dapat dikatakan sangat baik. Misalnya dengan NU,



Muhammadiyah, dan ormas lainnya. PITI DIY sering bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut, misalnya mengadakan kegiatan bersama dan meminta pendapat para ulamanya dalam penyelesaian masalah yang ada dalam PITI DIY. PITI DIY juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan kelompok-kelompok kemasyarakatan seperti Paguyuban Bhakti Putra, Paguyuban Tukang Becak, Yayasan Sosial Tunas Melati, Panti Asuhan Yatim Putra Islam, Jamaah-Jamaah Masjid serta dengan para Civitas Kampus dan Akademi di Yogyakarta.

Hubungan tersebut ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dan dinilai sukses. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PITI DIY masih diakui oleh pihak-pihak tersebut, di mana mereka adalah bagian dari masyarakat DIY. Oleh karena itu pula adaptasi yang dilakukan PITI DIY dengan anggota masyarakat. Pribumi dapat dikatakan tidak terlalu sulit. Sedangkan dengan masyarakat Tionghoa non-muslim sangat tergantung dari pribadi masing-masing supaya dapat bersikap baik dan tidak berubah walaupun sudah masuk Islam (wawancara dengan Ahmad Sutanto, 18 Juli 2006, di Yogyakarta).

Dari kalangan Tionghoa no-muslim mendapat tanggapan positif, dengan fakta bahwa mereka mengetahui keberadaan PITI DIY dan bersikap biasa saja. Seperti keterangan yang diberikan Ahmad Susanto;

“tanggapan dari teman-teman Tionghoa yang tidak Islam dapat dianggap positif, karena dari mereka tidak ada yang menghalangi padahal tahu keberadaan PITI DIY. Dapat dianggap positif karena mereka jadi bertanya-tanya tentang Islam (walaupun bertanya dengan agak sinis), misalnya kenapa orang Islam tidak boleh makan babi? Pertanyaan seperti ini memicu keingintahuan mereka tentang Islam sehingga kita dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang agama Islam”.

Dukungan eksternal lain yang diharapkan adalah dukungan dari Pemerintah. Jika Pemerintah menggunakan PITI terutama dalam hal pembauran akan luar biasa hasilnya.

Namun pemerintah terkesan setengah-setengah dalam memperhatikan PITI. Harus diingat bahwa orang Tionghoa dianggap minoritas tetapi jika disadari betul tidak demikian. Karena etnis ini di mana-mana ada. Saat ini bagaimana memberdayakan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang Tionghoa banyak “dianaktirikan” dan dimarginalkan selama ini, sehingga karena sering didiskriminasikan ada yang kurang berbakti pada negara, padahal banyak dari warga Tionghoa yang sebenarnya nasionalis. Jika telah nasionalis orang Tionghoa benar-benar dapat dengan total dalam berbangsa dan bernegara. Penting pula memberi kesempatan etnis Tionghoa dalam berbagai bidang, tidak hanya bidang ekonomi. Karena dengan sifat dasar yang sudah banyak dikenal sebagai pekerja yang gigih, jika diberi kesempatan dalam bidang lain dapat memberi kontribusi besar pada negara (wawancara dengan Budi Setyagraha dan Lie Sioe Fen, 11 April 2006, di Yogyakarta).

#### **F. Tantangan Masa Depan Organisasi dan Integrasi Sosial**

PITI memainkan peran sebagai jembatan penghubung. Posisi penting ini mesti membuat PITI untuk terus memperbaiki diri. Jembatan ini haruslah kokoh dan kuat. Artinya sebagai organisasi, PITI harus kompak, kuat dan berkualitas. *Kedua*, jembatan ini harus mengundang minat orang untuk melewatinya dan setiap orang yang lewat akan merasa aman dan nyaman. Maksudnya organisasi ini harus mampu menghilangkan kecurigaan dari berbagai pihak. *Ketiga*, jembatan ini harus besar, lurus dan lebar sehingga memiliki daya tampung yang besar. Artinya PITI harus berubah menjadi organisasi yang modern dan maju. Hal tersebut diupayakan agar PITI dapat turut menyukseskan “*nation and character building*” demi terwujud dan terpeliharanya integrasi bangsa secara baik dan berkesinambungan (warta PITI edisi 8 Mei 2004, hal 18). Idealitas ini tentunya juga diperuntukkan bagi PITI Korwil DIY, sebagai komponen PITI nasional.

Dalam rangka menyongsong masa depan akan banyak tantangan yang dihadapi PITI termasuk PITI DIY. Banyak

warga PITI dan tokoh-tokoh yang merumuskan tantangan masa depan PITI ini. Drs. Sujana Sulaeman (Chu Wey Yung) dalam Warta PITI, menulis beberapa isu yang dapat didistribusikan sebagai tantangan masa depan PITI.

Pertama, tentang nama. PITI dalam benak masyarakat telah identik dengan kumpulan atau organisasi Tionghoa Muslim Indonesia. Kadang-kadang setiap Tionghoa Muslim selalu diidentikkan dengan PITI atau anggota PITI. Akan tetapi dari sisi kepraktisan penyebutan singkatan dengan sejarahnya masing-masing sebenarnya cukup merepotkan. Perlu dipikirkan bahwa PITI disebut sebagai nama saja, sedang arti dari nama tersebut diberi makna yang sesuai dengan kaidah bahasa dan tuntunan dalam era sekarang ini. Jadi namanya menjadi PITI, Asosiasi Tionghoa Muslim Indonesia.

Kedua, bentuk organisasi. PITI berbeda dengan NU dan Muhammadiyah dalam dakwah dan ajaran Islam yang didakwahkan. NU menekankan pada ajaran *ahlu sunah wal jamaah* sedangkan Muhammadiyah menekankan pada ajaran Al-Quran dan Hadist. PITI masih menguatkan posisi sebagai pembina aqidah umat.

Ketiga, modal pengembangan. Berdasarkan pengalaman organisasi lain, sebuah organisasi akan hidup dan berkembang apabila ditunjang oleh; pertama orang-orang yang telah mapan, baik secara ekonomi maupun secara mental spiritual. Kedua, kelompok tengah baya, kaum profesional. Ketiga anak-anak muda dan remaja. Apabila di setiap tingkatan dapat ditunjang secara bersama-sama oleh ketiga kelompok tersebut, maka insyaAllah PITI akan hidup tersu menerus, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang dicita-citakan (Warta PITI edisi 8 Mei 2004 hal 19).

Di Indonesia Tionghoa secara umum minoritas, lebih minoritas lagi tentunya yang masuk Islam (terutama dalam keluarga). Yang dapat merubah kedudukan orang Tionghoa Muslim di dalam masyarakat hanya dirinya sendiri. Kebanyakan orang Tionghoa mengetahui dan menyadari tentang sejarah tetapi tidak berani berbicara. Untuk mengubah persepsi masyarakat sudah saatnya orang Tionghoa khususnya

yang terwadahi dalam PITI berbicara tentang sejarah yang sebenarnya (wawancara dengan Fauzan, 4 Desember 2005, di Surabaya).

### G. Eksistensi dan Perkembangan PITI DIY di Masa Datang

Karakter PITI DIY berbeda dengan Korwil PITI yang lain. Iklim intelektualnya lebih kondusif, dibanding misalnya Jakarta, Surabaya atau Semarang yang lebih beriklim industri. Iklim intelektual tersebut didukung dengan banyaknya kampus dan lembaga pendidikan. Ini merupakan "lahan basah" untuk mengaktualisasikan diri lewat dunia pendidikan. Di Yogyakarta budaya tulis dan membaca sudah bagus, gudangnya buku. Seharusnya PITI DIY sudah bisa membuat buku, misalnya tentang budaya Tionghoa atau budaya Jawa. Jika PITI DIY tidak bisa berbicara lewat forum atau media yang membutuhkan dana besar, maka dapat melakukan kegiatan melalui jalur intelektual misalnya membuat buletin dan selebaran-selebaran kemudian disebar baik pada DPD maupun masyarakat. Cara demikian tidak memerlukan dana yang terlalu besar namun banyak sekali manfaatnya.

Untuk eksis PITI DIY harus mencari jalan keluar mengenai persoalan pendanaan. Selama ini acara-acara PITI DIY dapat berjalan, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang masih dipertanyakan dengan pendanaan dari segelintir warga. Bahkan ada yang menyebut hanya berasal dari satu sumber sehingga belum ada cerminan kepemilikan PITI untuk seluruh warganya. Oleh sebab itu iuran perlu digalakkan, misalnya dengan mengedarkan list sumbangan atau *sodaqoh* pada setiap warganya dengan diberi pengertian hal tersebut untuk membesarkan PITI. Dengan semua warganya menyumbang semua merasa memiliki dan mempunyai peran dalam PITI (Diskusi dengan Linda Lestari dan Bambang Berger, 7 Maret 2006, di Yogyakarta).

Isu tentang pendanaan sangat penting. Semua warga menginginkan pendanaan dalam PITI DIY digarap dengan baik agar menjadi cerminan kepemilikan PITI yang menyeluruh

pada setiap warga. Dari berbagai kritik yang disampaikan memperlihatkan adanya beberapa permasalahan dalam PITI DIY. Di antaranya yaitu masalah organisatoris yang perlu ditingkatkan penggarapannya. Misalnya adanya kantor sekretariat yang belum dikelola dengan manajemen yang profesional, masalah pendanaan, dan masalah sosialisasi yang belum digarap dengan efektif. Pada intinya dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam PITI Korwil DIY terutama yang berkaitan dengan organisasi disebabkan adanya kurang komunikasi antar warganya.

## H. Kesimpulan

Organisasi PITI Korwil DIY selama lima periode kepemimpinannya telah melakukan beberapa strategi dalam pemberdayaan individunya terutama dalam hal pembauran. Hal tersebut merupakan kontribusi atau upaya yang dilakukan organisasi untuk ikut berperan dalam integrasi sosial. Strategi dilakukan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan agama, sosial, budaya, dan politik. Pendekatan agama dengan cara berdakwah. Pendekatan sosial dengan menghimbau anggotanya untuk berinteraksi yang baik dengan lingkungan sekitar. Pendekatan budaya dilakukan dengan lebih banyak lagi memperkenalkan budaya Tionghoa kepada masyarakat. Dan pendekatan politik dalam PITI DIY berusaha dilakukan pula meskipun baru dilakukan oleh beberapa personil saja yang berani terjun langsung pada politik praktis.

Kendala-kendala yang dapat ditemukan dalam penelitian ini dibagi menjadi enam. *Pertama*, Indonesia memiliki keanekaragaman etnis, termasuk pendatang Tionghoa atau non-pri dan etni asli atau pribumi. *Kedua*, Indonesia memiliki berbagai macam agama yang dianut masyarakatnya dengan agama mayoritas adalah Islam. *Ketiga*, golongan non-pri memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang dibawa dari tanah leluhur. *Keempat*, identiknya etnis Tionghoa dengan ekonomi tingkat atas dengan pribumi sebagai golongan ekonomi tingkat bawah. Meskipun tidak 100% benar, tetapi pandangan yang sudah masyarakat ini menyebabkan semakin jauhnya

hubungan keduanya. *Kelima*, warga pribumi yang identik dengan Islam dikategorikan sebagai golongan kaum miskin. *Keenam*, budaya etnis Tionghoa dalam mempertahankan ekonominya dianggap berlebihan dan sering mendapat stigma dari pribumi sebagai sifat pelit dan suka menghalalkan segala cara.

## Daftar Pustaka

- Arsono, Elliot, 1972. *Social Animal*, WH Freman and Company.
- Haryono, P. 1994. *Kultur Tionghoa dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hartono, Paul and Hunt. L. Chester. 1987. *Sosiologi Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Jahja, Junus. 1991. *WNI Beragama Islam*. Jakarta: Yayasan Haji Abdulkarim Oei Tjeng Hien.
- . 1991. *Islam di Mata WNI*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- . 1985. *Muslim Tionghoa*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah.
- Jonhson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirjo, Sartono. 1986. "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjoroningrat, (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- May, Tin. 1993. *Social Research; Issues, Methods, and Process*. Buckingham: Open University Press.
- Miles, B. Matthews and Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohadi. Jakarta: UI Press.
- Narbuko, Cholid. Achmadi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Asakara.
- Nasikun. 2001. *Sistem Sosial Indonesia*, Cetakan kesebelas. Jakarta: Rajawali Press.

- Sarapung, Elga. 2002. "Memahami Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian", dalam Elmirzana, Sihaloho, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian*, The Asia Foundation co., Dian Interfidei.
- Setiono, Benny G. 2002. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa.
- Soekamto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukisman, WD. 1975. *Masalah Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: Bangun Indah.
- Widjaya, Ki Hasan. 1989. *Panggilan Islam Terhadap Keturunan Tionghoa di Indonesia*, Surakarta: UD. Mayasari.